

EFEKTIFITAS BANTUAN SOSIAL KOMPONEN PENDIDIKAN DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PADA TINGKAT SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS (SLTA) KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Khairil Padli¹ Purwaningsih²

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan komponen pendidikan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kelurahan Sempaja Selatan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya di bidang pendidikan. permasalahan dalam penelitian ini yaitu bantuan sosial komponen pendidikan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak pada tingkat SLTA. Keterbatasan jumlah bantuan menyebabkan keluarga penerima manfaat masih harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memenuhi kekurangan kebutuhan pendidikan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah enam orang, yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan PKH, terdiri atas satu aparatur kelurahan, satu pendamping sosial PKH, tiga keluarga penerima manfaat (KPM) yang memiliki anak bersekolah di tingkat SLTA dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta satu guru sekolah. Analisis data mengacu pada pelaksanaan empat komponen pendidikan PKH Pasal 6 Pedoman Umum PKH, meliputi bantuan sosial tunai bersyarat, pendampingan sosial, akses terhadap layanan pendidikan, dan bantuan komplementer seperti Program Indonesia Pintar (PIP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan komponen pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sempaja Selatan belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan karena jumlah bantuan yang diberikan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan siswa tingkat SLTA, sehingga keluarga penerima

¹ Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: khairilpadli2003@email.com

² Purwaningsih, Dosen Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

manfaat masih harus menggunakan biaya pribadi untuk menutupi kekurangan kebutuhan sekolah. Secara umum, PKH memiliki peran penting dalam mendukung akses pendidikan bagi keluarga miskin.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, pendidikan, Efektifitas, bantuan sosial

Pendahuluan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat karena memberikan pengetahuan, keterampilan, serta kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup (Hamalik, 2001). Namun, masih banyak anak dari keluarga kurang mampu yang mengalami kesulitan mengakses pendidikan, terutama pada jenjang SLTA, akibat keterbatasan ekonomi yang meningkatkan risiko putus sekolah (Nurwati & Listari, 2021). Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial RI, 2024).

Bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) berupa bantuan tunai bersyarat yang disalurkan secara non-tunai kepada keluarga miskin untuk mendukung pendidikan anak. Bantuan ini membantu memenuhi kebutuhan sekolah, seperti seragam, alat tulis, transportasi, dan perlengkapan belajar. Selain meringankan beban ekonomi keluarga, PKH bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga anak-anak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah dan memiliki peluang yang lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup di masa depan (Bambang, 2015).

Salah satu komponen penting dalam PKH adalah komponen pendidikan yang menysasar anak usia sekolah mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA/ sederajat. Bantuan pendidikan diberikan untuk meringankan beban biaya sekolah sehingga keluarga miskin tidak lagi menganggap pendidikan sebagai beban ekonomi, tetapi sebagai investasi masa depan keluarga. Hamalik (2001) menjelaskan bahwa pendidikan berperan penting dalam membentuk manusia yang mandiri, produktif, dan berdaya saing tinggi sehingga menjadi faktor utama dalam mengurangi kemiskinan.

Pelaksanaan komponen pendidikan PKH didukung melalui pendampingan sosial yang dilakukan oleh pendamping PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendampingan bertujuan membina, mengawasi, dan mendorong keluarga agar memenuhi kewajiban pendidikan anak serta menumbuhkan perubahan perilaku positif di bidang pendidikan (Nurwan & Hasan, 2020). Selain itu, pelayanan pendidikan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PKH, yaitu melalui akses dan partisipasi anak penerima manfaat pada pendidikan formal hingga jenjang SLTA sebagai indikator keberhasilan program (Kementerian Sosial RI, 2024). Pelaksanaan PKH juga diperkuat dengan bantuan

komplementer, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan seragam sekolah, dan perlengkapan belajar untuk mendukung keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga miskin.

Efektivitas komponen pendidikan PKH dapat diartikan sebagai sejauh mana program berhasil mencapai tujuan dalam meningkatkan partisipasi sekolah, mengurangi angka putus sekolah, serta meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak penerima manfaat. Efektivitas tersebut dipengaruhi oleh sinergi antara bantuan sosial, pendampingan, pelayanan pendidikan, dan bantuan komplementer yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat.

Meskipun demikian, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan belum sepenuhnya efektif. Beberapa keluarga penerima manfaat masih mengalami kendala dalam menggunakan ATM untuk mencairkan bantuan sehingga bantuan yang diberikan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal (Putri, 2024). Selain itu, jumlah bantuan pendidikan sering kali belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan sekolah anak, terutama pada jenjang SMA yang membutuhkan biaya lebih besar (Nurhafifa, 2022; Baiq Dewi, 2024). Rendahnya pemahaman dan kesadaran orang tua dalam memanfaatkan bantuan, serta pendampingan sosial yang belum maksimal, juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan program (Desi, 2020).

Fenomena tersebut juga terlihat di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, yang menjadi lokasi penelitian ini. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) meningkat dari 275 keluarga pada tahun 2024 menjadi 316 keluarga pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, tercatat 356 anak penerima bantuan pendidikan yang terdiri atas 160 siswa SD, 96 siswa SMP, dan 100 siswa SMA (Pendamping PKH Kelurahan Sempaja Selatan, 2025). Peningkatan jumlah penerima manfaat ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial serta perlunya evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaannya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bantuan sosial komponen pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak pada jenjang SLTA. Keterbatasan bantuan menyebabkan keluarga penerima manfaat (KPM) masih harus menanggung sebagian biaya pendidikan, seperti transportasi, seragam, dan perlengkapan sekolah. Selain itu, pelaksanaan PKH masih menghadapi kendala, seperti keterlambatan pencairan bantuan, kesulitan penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta rendahnya pemahaman KPM terhadap administrasi perbankan dan kewajiban program. Beberapa keluarga bahkan menyatakan bahwa tanpa bantuan PKH, anak-anak mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat SMA. Hal ini menunjukkan bahwa PKH tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan pendidikan yang membantu keluarga miskin meningkatkan taraf hidupnya (Desi, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas komponen pendidikan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana pelaksanaan PKH berperan dalam mendukung pendidikan anak dari keluarga penerima manfaat, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dan kontekstual bagi peningkatan efektivitas program di masa mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena metode ini sesuai untuk menggambarkan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan pengalaman para informan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami efektivitas komponen pendidikan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, dari perspektif keluarga penerima manfaat, pendamping PKH, dan pihak kelurahan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali persepsi, pengalaman, dan makna yang diberikan informan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peran PKH dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang memiliki 316 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian berlangsung dari 14 April hingga 27 Agustus 2025 dan mencakup wawancara, observasi, pengumpulan data, analisis, serta penyusunan laporan. Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan, kendala yang dihadapi peneliti adalah menyesuaikan waktu dan jadwal para informan saat proses wawancara berlangsung. Namun demikian, para informan bersikap terbuka, kooperatif, dan bersedia memberikan data serta informasi yang dibutuhkan peneliti sehingga proses pengumpulan data dapat berjalan dengan baik.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap enam informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara. Informan tersebut terdiri atas Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kesra), Pendamping PKH, tiga Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan seorang guru SMK. Mereka memberikan informasi mengenai pelaksanaan program, pemanfaatan bantuan pendidikan, serta dampaknya terhadap keberlanjutan sekolah anak. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, seperti peraturan perundang-undangan, pedoman PKH, data statistik, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data ini digunakan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung analisis hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk melihat pemanfaatan bantuan pendidikan PKH oleh keluarga penerima manfaat. Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan Kasi Kesra, pendamping PKH, guru SMA/SMK, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program, manfaat, dan kendala yang dihadapi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data penerima PKH, laporan kegiatan, dokumen kelurahan, dan foto penelitian sebagai pelengkap data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memahami pelaksanaan komponen pendidikan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, dan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian, seperti pemanfaatan bantuan pendidikan, peran pendamping PKH, dampak terhadap keberlanjutan sekolah anak, serta kendala yang dihadapi keluarga penerima manfaat. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan melalui interpretasi data yang telah diverifikasi menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bantuan sosial pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan anak-anak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini diberikan sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi hambatan ekonomi yang sering menjadi penyebab rendahnya partisipasi pendidikan, khususnya pada keluarga miskin dan rentan miskin. Melalui bantuan pendidikan PKH, diharapkan anak-anak KPM dapat tetap bersekolah, memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, serta terhindar dari risiko putus sekolah.

Harapan program bantuan sosial pendidikan PKH adalah agar bantuan yang diberikan mampu membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pendidikan anak secara berkelanjutan, meningkatkan partisipasi sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah pada keluarga penerima manfaat. Selain itu, pemerintah juga berharap bantuan pendidikan dapat digunakan secara tepat untuk kebutuhan sekolah anak dan disalurkan secara mudah, tepat waktu, serta tepat sasaran.

Informan dalam penelitian ini terdiri atas informan kunci, informan utama, dan informan pendukung yang dipilih berdasarkan keterlibatan dan

pemahaman mereka terhadap pelaksanaan bantuan sosial pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sempaja Selatan. Jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini sebanyak enam orang.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak AW selaku Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan serta Ibu EP sebagai Pendamping PKH. Kedua informan ini dipilih karena memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan, pendampingan, pengawasan, serta penyaluran bantuan sosial pendidikan PKH kepada masyarakat penerima manfaat.

Informan utama dalam penelitian ini terdiri atas tiga orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, yaitu Ibu R, Ibu RM, dan Ibu J. Ketiganya dipilih karena memiliki anak pada jenjang SLTA dan menerima bantuan sosial pendidikan PKH sehingga dapat memberikan informasi mengenai pemanfaatan bantuan tersebut. Ibu R (43 tahun), seorang buruh cuci, telah menerima PKH sejak 2018 dan memanfaatkan bantuan untuk biaya transportasi serta perlengkapan sekolah anak. Ibu RM (39 tahun), pedagang sayur, menerima PKH sejak 2012 dan menggunakan bantuan untuk membeli seragam, alat tulis, dan kebutuhan sekolah lainnya. Sementara itu, Ibu J (45 tahun), ibu rumah tangga dengan suami yang bekerja sebagai tukang bangunan, telah menerima PKH selama sekitar 5–6 tahun. Bagi keluarganya, bantuan pendidikan PKH menjadi salah satu penopang utama keberlanjutan pendidikan anak. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan satu informan pendukung, yaitu Ibu F selaku guru SMK. Informan pendukung dipilih karena dianggap mengetahui kondisi pendidikan siswa penerima bantuan PKH serta dapat memberikan informasi tambahan mengenai keberlanjutan pendidikan anak-anak penerima bantuan sosial pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Sempaja Selatan, bantuan sosial pendidikan PKH berperan penting dalam membantu keluarga memenuhi kebutuhan pendidikan anak pada jenjang SLTA. Pihak kelurahan menyatakan bahwa bantuan ini sangat membantu karena biaya pendidikan di tingkat SMA relatif lebih tinggi. Selain itu, koordinasi antara kelurahan dan pendamping PKH terus dilakukan agar bantuan tepat sasaran dan diterima oleh keluarga yang memenuhi kriteria program. Kasi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sempaja Selatan menyampaikan:

“Program bantuan pendidikan PKH ini sangat membantu masyarakat, terutama keluarga yang ekonominya terbatas. Banyak orang tua merasa terbantu karena bantuan tersebut dapat dipakai untuk kebutuhan sekolah anak dari keluarga penerima manfaat PKH.” (Wawancara dengan Kasi Kesra Kelurahan Sempaja Selatan)

Pendamping PKH juga menjelaskan bahwa komponen pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan pendampingan sosial kepada KPM. Pendamping secara rutin melakukan pemantauan terhadap kehadiran dan keberlanjutan sekolah anak penerima bantuan agar tujuan program dapat tercapai dengan baik.

Pendamping PKH Ibu EP menyatakan:

“Sebagai Pendamping kami selalu mengingatkan orang tua agar bantuan pendidikan yang di terima dapat digunakan sesuai kebutuhan sekolah anak. Kami sebagai pendamping memberikan motivasi keorannng tua KPM supaya anak tetap aktif sekolah dan tidak putus di tengah jalan.”
(Wawancara dengan Pendamping PKH)

Selain melakukan pendampingan, pendamping PKH juga rutin melakukan sosialisasi mengenai peraturan Program Keluarga Harapan kepada KPM melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Sosialisasi tersebut meliputi kewajiban anak untuk tetap aktif bersekolah, tata cara pencairan bantuan, penggunaan bantuan pendidikan, jadwal pencairan bantuan, hingga ketentuan penerima bantuan PKH.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar KPM mengetahui aturan dasar PKH, terutama mengenai kewajiban anak untuk tetap sekolah dan penggunaan bantuan untuk kebutuhan pendidikan. Namun, dalam realitas di lapangan masih terdapat beberapa KPM yang belum memahami secara rinci mengenai mekanisme administrasi, prosedur pencairan bantuan, maupun ketentuan teknis program. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, usia penerima manfaat, dan keterbatasan akses informasi.

Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga menyampaikan bahwa bantuan pendidikan PKH sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak meskipun jumlah bantuan belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan pendidikan.

Ibu RM menyampaikan:

“Bantuannya sangat membantu untuk kebutuhan sekolah anak, terutama buat ongkos dan perlengkapan sekolah. Kalau tidak ada bantuan ini, kami cukup sulit juga untuk memenuhi kebutuhan pendidika anak.”(Wawancara dengan KPM)

Ibu J juga menyampaikan:

“Uang yang di dapat dari bantuan PKH biasanya dipakai untuk beli seragam, sepatu, buku, dan ongkos sekolah anak. Jadi bantuan ini memang dipakai khusus untuk kebutuhan sekolah.”(Wawancara dengan KPM)

Berdasarkan temuan tersebut, bantuan sosial pendidikan PKH tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi, tetapi juga menjadi bentuk dukungan sosial pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pendidikan anak-anak dari keluarga penerima manfaat di Kelurahan Sempaja Selatan.

Efisiensi Bantuan Sosial Pendidikan

Efisiensi bantuan sosial pendidikan dilihat dari cara dan kelancaran penyaluran bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Sempaja Selatan, bantuan

pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan langsung masuk ke rekening KPM. Mekanisme penyaluran ini dinilai lebih praktis karena mengurangi proses administrasi yang berbelit dan meminimalkan keterlibatan pihak perantara.

Dari sisi pemerintah kelurahan, sistem penyaluran bantuan melalui rekening bank dinilai lebih efisien dibandingkan penyaluran secara langsung. Penyaluran non-tunai dianggap mampu mempermudah pengawasan, mengurangi antrean panjang, dan meningkatkan transparansi dalam proses pencairan bantuan.

Kasi Kesra Kelurahan menjelaskan:

“Dengan sistem KKS dan rekening bank, bantuan PKH yg diterima menjadi lebih mudah dipantau dan penerima juga lebih cepat menerima bantuan tanpa harus melalui proses administrasi yang panjang.”(Wawancara dengan Kasi Kesra Kelurahan)

Sebagian besar KPM menyatakan bahwa penyaluran bantuan melalui KKS memudahkan mereka dalam menerima bantuan pendidikan. KPM tidak perlu datang ke kantor tertentu atau mengikuti prosedur yang rumit, melainkan cukup mencairkan bantuan melalui ATM atau agen bank yang tersedia.

Harapan dari sistem distribusi bantuan PKH adalah agar bantuan dapat diterima secara cepat, tepat waktu, mudah diakses, dan transparan oleh seluruh penerima manfaat. Sistem non-tunai melalui rekening bank diharapkan mampu mempermudah proses pencairan dan mengurangi penyalahgunaan bantuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar KPM memahami penyaluran bantuan PKH melalui rekening menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Informasi pencairan umumnya diperoleh dari pendamping PKH melalui pertemuan kelompok atau komunikasi langsung. Namun, masih terdapat kendala, seperti kesulitan menggunakan ATM, keterlambatan pencairan akibat gangguan sistem bank, antrean pencairan, serta rendahnya pemahaman teknologi, terutama pada KPM lanjut usia. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan Ibu RM:

“Bantuannya langsung masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), jadi tinggal ambil di ATM. Prosesnya lebih mudah dan tidak perlu melalui banyak tahapan, sehingga kami sebagai penerima manfaat tidak mengalami kesulitan saat pencairan.”(Wawancara dengan KPM)

Dari sisi ketepatan waktu, pencairan bantuan pendidikan PKH pada umumnya dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disampaikan oleh pendamping PKH kepada KPM. Peran pendamping PKH dalam memberikan informasi terkait waktu pencairan bantuan sangat membantu KPM dalam mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak.

Pendamping PKH menjelaskan:

“Bantuan PKH ini diberikan dalam bentuk uang tunai dan disalurkan secara bertahap setiap 3 bulan sekali. Penyalurannya melalui bank-bank yang sudah bekerja sama, seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri. Bantuan ini langsung masuk ke rekening KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera

(KKS) yang telah diberikan, sehingga orang tua bisa langsung mengambil dana bantuan di ATM sesuai jadwal pencairan yang telah ditentukan.”(Wawancara dengan Pendamping PKH, Ibu EP)

Namun demikian, dalam beberapa kasus masih ditemukan keterlambatan pencairan yang disebabkan oleh kendala teknis, seperti gangguan sistem atau proses administrasi perbankan. Meskipun demikian, keterlambatan tersebut tidak terjadi secara terus-menerus dan tidak terlalu menghambat pemanfaatan bantuan untuk kebutuhan pendidikan anak SLTA.

Berdasarkan temuan tersebut, bantuan sosial pendidikan PKH di Kelurahan Sempaja Selatan dapat dikatakan cukup efisien karena disalurkan secara langsung ke rekening KPM, mudah diakses, serta relatif tepat waktu. Namun dalam realitas pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala teknis yang menyebabkan sebagian KPM mengalami kesulitan dalam proses pencairan bantuan.

Kecukupan Bantuan Sosial Pendidikan

Kecukupan bantuan sosial pendidikan dilihat dari sejauh mana bantuan pendidikan Program Keluarga Harapan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Sempaja Selatan, bantuan pendidikan PKH sangat membantu meringankan beban biaya sekolah, namun jumlahnya belum sepenuhnya mencukupi untuk menutupi seluruh kebutuhan pendidikan anak.

Dalam komponen pendidikan jenjang SMA/SMK, setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp2.000.000 per tahun yang disalurkan secara bertahap sebesar Rp500.000 setiap tiga bulan. Sistem penyaluran secara triwulan ini dinilai memudahkan keluarga dalam mengatur penggunaan dana sesuai kebutuhan sekolah anak.

Hal tersebut disampaikan oleh Ibu RM:

“Dicairkan per tiga bulan uang yang kami terima Rp500.000 untuk per tiga bulanya dan setahunnya Rp2,000,000 itu lumayan membantu, jadi tidak langsung habis, bisa dipakai bertahap sesuai kebutuhan sekolah anak.”(Wawancara dengan Ibu RM, KPM PKH)

Pendamping PKH juga menjelaskan bahwa meskipun bantuan pendidikan cukup membantu keluarga penerima manfaat, kebutuhan pendidikan siswa SMA saat ini semakin besar sehingga bantuan yang diterima sering kali belum mencukupi seluruh kebutuhan sekolah.

Pendamping PKH Ibu EP menyampaikan:

“Kalau untuk membantu memang sangat membantu, terutama untuk keluarga yang penghasilannya rendah. Tetapi untuk kebutuhan anak SMA sekarang memang biayanya cukup besar, jadi biasanya orang tua tetap harus menambah biaya sendiri.”(Wawancara dengan Pendamping PKH)

Bantuan tersebut umumnya digunakan untuk membeli seragam, sepatu, tas, buku, alat tulis, fotokopi tugas, biaya kegiatan sekolah, serta membayar biaya transportasi ke sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu RM dan Ibu J, biaya transportasi anak rata-rata sebesar Rp13.000 untuk kebutuhan transportasi selama tiga hingga empat hari sekolah. Apabila dihitung, dalam satu bulan biaya transportasi berkisar antara Rp104.000 hingga Rp130.000. Dalam satu triwulan atau tiga bulan, total biaya transportasi mencapai sekitar Rp292.500 hingga Rp390.000.

Dengan bantuan PKH sebesar Rp500.000 per triwulan, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk membiayai transportasi sekolah. Setelah dikurangi biaya transportasi, sisa dana yang tersedia sekitar Rp110.000 hingga Rp207.500. Jumlah tersebut masih harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya, seperti seragam, buku, alat tulis, sepatu, tas, dan berbagai keperluan sekolah lainnya.

Program PKH diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasar pendidikan anak sehingga keluarga miskin tidak terkendala dalam membiayai sekolah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bantuan pendidikan PKH dapat meringankan beban ekonomi keluarga, bantuan tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan pendidikan siswa SMA/SMK. Akibatnya, keluarga penerima manfaat masih harus menanggung sebagian biaya pendidikan dari pendapatan mereka sendiri. Hal ini ditegaskan oleh Ibu J:

“Kalau dibilang cukup, sebenarnya belum cukup, apalagi kalau ada kebutuhan lain seperti kegiatan sekolah anak jadi tetap harus nambah dari uang sendiri.” (Wawancara dengan Ibu J, KPM PKH)

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bantuan pendidikan PKH sudah cukup membantu dalam meringankan beban ekonomi keluarga dan mendukung keberlangsungan pendidikan anak. Namun, dari segi kecukupan, besaran bantuan yang diterima belum sepenuhnya mampu menutupi seluruh kebutuhan pendidikan anak pada jenjang SMA/SMK di Kelurahan Sempaja Selatan.

Ketepatan Bantuan Sosial Pendidikan

Ketepatan bantuan sosial pendidikan dinilai dari kesesuaian sasaran penerima dan pemanfaatannya oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil penelitian di Kelurahan Sempaja Selatan menunjukkan bahwa penerima bantuan merupakan keluarga yang memiliki anak aktif bersekolah pada jenjang SLTA. Pihak kelurahan menilai bantuan PKH telah cukup tepat sasaran karena diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria, dengan verifikasi data dilakukan bersama pendamping PKH sesuai ketentuan program. Kasi Kesra Kelurahan menyampaikan:

“Penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data DTKS dan hasil verifikasi di lapangan. Jadi bantuan pendidikan ini memang diarahkan kepada keluarga yang memiliki anak sekolah dan

membutuhkan dukungan biaya pendidikan.”(Wawancara dengan Kasi Kesra Kelurahan)

Pendamping PKH menjelaskan bahwa keaktifan anak dalam mengikuti pendidikan menjadi salah satu syarat utama dalam penyaluran bantuan pendidikan. Apabila anak tidak lagi aktif bersekolah atau tidak memenuhi kewajiban pendidikan, maka bantuan dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan program.

Pendamping PKH Ibu EP menyatakan:

“Kalau anak sering tidak masuk sekolah atau malah berhenti sekolah, maka bantuan PKH untuk pendidikan ini bisa dihentikan. Karena itu, orang tua punya kewajiban untuk selalu mendukung dan memotivasi anak supaya tetap sekolah sampai lulus.”(Wawancara dengan Pendamping PKH)

Selain ketepatan sasaran, ketepatan bantuan juga dilihat dari penggunaan bantuan oleh KPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan pendidikan PKH pada umumnya digunakan sesuai dengan tujuan program, yaitu untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak seperti membeli seragam, sepatu, tas, buku pelajaran, alat tulis, biaya transportasi, fotokopi tugas, dan perlengkapan belajar lainnya.

Ibu J menyampaikan:

“Uangnya yang saya terima dari bantuan PKH ini saya pakai buat beli seragam, sepatu, sama ongkos anak ke sekolah.”(Wawancara dengan KPM)

Selain itu, Ibu R juga menjelaskan bahwa bantuan pendidikan PKH sangat membantu keluarganya dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak, terutama ketika terdapat kebutuhan mendadak di sekolah.

Ibu R menyampaikan:

“Kalau ada kebutuhan sekolah mendadak seperti beli buku, fotokopi tugas, atau perlengkapan sekolah lainnya, bantuan PKH ini sangat membantu kami sebagai orang tua.”(Wawancara dengan KPM)

Harapan program bantuan pendidikan PKH adalah agar bantuan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan dan digunakan secara tepat untuk kepentingan pendidikan anak. Realitas hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan pendidikan PKH di Kelurahan Sempaja Selatan sudah cukup tepat sasaran karena diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat dan memiliki anak yang masih aktif sekolah. Selain itu, sebagian besar bantuan juga digunakan sesuai tujuan pendidikan. Namun demikian, dalam kondisi ekonomi tertentu, sebagian kecil dana bantuan terkadang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga yang mendesak karena keterbatasan ekonomi keluarga penerima manfaat.

Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan pemberian bantuan dengan pemanfaatan bantuan di lapangan. KPM memahami bahwa bantuan pendidikan PKH ditujukan khusus untuk mendukung keberlangsungan pendidikan anak SLTA. Berdasarkan temuan tersebut, bantuan sosial pendidikan PKH dapat dikatakan cukup tepat sasaran dan tepat guna karena diberikan kepada keluarga yang memenuhi kriteria sebagai KPM, memiliki anak yang masih aktif bersekolah di jenjang SLTA, serta digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan anak sebagaimana ditetapkan dalam Program Keluarga Harapan.

Pembahasan

Bantuan sosial pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk perlindungan sosial pemerintah yang bertujuan membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak agar tetap dapat bersekolah dan terhindar dari risiko putus sekolah. Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Sempaja Selatan, bantuan pendidikan PKH memiliki peran penting dalam membantu keberlangsungan pendidikan anak, khususnya pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Bantuan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seperti biaya transportasi, pembelian seragam, sepatu, tas, buku, alat tulis, serta perlengkapan sekolah lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan pendidikan PKH sangat membantu keluarga penerima manfaat yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah dan penghasilan tidak tetap. Informan penelitian seperti Ibu R, Ibu RM, dan Ibu J menyampaikan bahwa bantuan pendidikan PKH mampu meringankan beban pengeluaran sekolah anak. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan program dalam membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan pendidikan anak telah berjalan dengan cukup baik. Selain itu, pihak kelurahan dan pendamping PKH juga terus melakukan koordinasi serta pemantauan terhadap penerima manfaat agar bantuan tepat sasaran dan digunakan sesuai tujuan program.

Dalam aspek efisiensi, penyaluran bantuan pendidikan PKH melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dinilai cukup efektif karena bantuan langsung masuk ke rekening penerima manfaat. Sistem penyaluran non-tunai ini mempermudah KPM dalam proses pencairan bantuan serta mengurangi prosedur administrasi yang rumit. Sebagian besar KPM memahami bahwa bantuan dapat dicairkan melalui ATM atau agen bank sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pendamping PKH. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala seperti keterlambatan pencairan akibat gangguan sistem bank, antrean pencairan bantuan, dan keterbatasan sebagian penerima manfaat dalam memahami penggunaan ATM.

Selain itu, pendamping PKH juga rutin melakukan sosialisasi mengenai peraturan dan mekanisme Program Keluarga Harapan melalui kegiatan pendampingan dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Sosialisasi tersebut meliputi kewajiban anak untuk tetap aktif bersekolah, jadwal pencairan bantuan, penggunaan bantuan pendidikan, serta ketentuan penerima manfaat PKH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar KPM

mengetahui aturan dasar PKH dan memahami bahwa bantuan pendidikan harus digunakan untuk kebutuhan sekolah anak. Akan tetapi, beberapa penerima manfaat masih belum memahami secara rinci mengenai prosedur administrasi dan mekanisme teknis program karena keterbatasan pendidikan dan akses informasi.

Dalam aspek kecukupan bantuan, hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan pendidikan PKH memang membantu meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan pendidikan siswa SMA/SMK. Besaran bantuan sebesar Rp500.000 per triwulan sebagian besar digunakan untuk biaya transportasi sekolah sehingga sisa bantuan yang tersedia masih harus dibagi untuk kebutuhan lain seperti buku, alat tulis, seragam, dan perlengkapan sekolah lainnya. Kondisi ini menyebabkan keluarga penerima manfaat tetap harus menambah biaya pendidikan dari pendapatan mereka sendiri.

Sementara itu, dari aspek ketepatan bantuan, hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan pendidikan PKH di Kelurahan Sempaja Selatan sudah cukup tepat sasaran karena diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan dan memiliki anak yang masih aktif bersekolah. Selain itu, penggunaan bantuan juga pada umumnya telah sesuai dengan tujuan program, yaitu untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak. Meskipun dalam kondisi tertentu sebagian kecil dana bantuan terkadang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga yang mendesak, secara umum bantuan pendidikan PKH tetap dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan anak penerima manfaat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, bantuan sosial pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sempaja Selatan memiliki peran penting dalam membantu keluarga penerima manfaat memenuhi kebutuhan pendidikan anak pada jenjang SLTA. Bantuan tersebut digunakan untuk biaya transportasi, seragam, buku, alat tulis, dan perlengkapan sekolah lainnya. Dari aspek efisiensi, penyaluran bantuan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dinilai cukup mudah dan praktis meskipun masih terdapat kendala teknis dalam proses pencairan. Dari aspek kecukupan, bantuan pendidikan PKH belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan anak karena tingginya biaya sekolah dan transportasi. Sementara itu, dari aspek ketepatan, bantuan pendidikan PKH sudah cukup tepat sasaran dan pada umumnya digunakan sesuai tujuan program, yaitu untuk mendukung keberlangsungan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran, yaitu pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan peningkatan besaran bantuan pendidikan PKH agar lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan siswa SMA/SMK saat ini. Pendamping PKH juga diharapkan terus meningkatkan

sosialisasi dan pendampingan kepada KPM mengenai aturan, penggunaan bantuan, dan mekanisme pencairan bantuan agar pemahaman masyarakat semakin baik. Selain itu, pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pencairan bantuan untuk mengurangi kendala teknis dan keterlambatan pencairan bantuan sehingga bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh keluarga penerima manfaat.

Daftar Pustaka

- Bambang. (2015). Program Keluarga Harapan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Jakarta.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Sage Publications.
- Desi, P. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur).
- Imawan, Riswandha. 1997. *Membedah Pol* Baiq Dewi Kamariani. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Suryawangi.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2024. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kemensos RI.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007 tentang Program Keluarga Harapan.
- Lubis, Ema Fitri, and Evi Zubaidah. 2020. "Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan." *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial* 9(2):88–99. doi: 10.35724/sjias.v9i2.2801.
- NURHAFIFA, A. (2022). Eektifitas Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mabonta Kec. Burau
- Nurwan, T. W., & Hasan, H. (2020). Keberhasilan PKH ditinjau dalam kaitannya dengan Keterampilan Pendamping dan Partisipasi KPM: Studi di Sijunjung Sumatera Barat.
- Nurwati, R. N., & Listari, Z. P. (2021). "Pengaruh Status Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. 2020. *Journal GEEJ* 7(2):1–14.
- Putri, Melati. 2016. "Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima." (July):1–23.

- Putri, N. H. Y. (2024). Efektivitas program keluarga harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan pasca COVID-19
- Richard, M.S. (1985) Efektivitas Kerja Jakarta: PT Gramedia Pustaka
- Rizki, R.A. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
- Siagian, S. P. (2001). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (1986). Sosiologi: Suatu pengantar. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. 2020. Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Sumbawati, Novi Kadewi, A. Asmini, Heni Juliawati, and Binar Dwiyanto Pamungkas. 2020. "Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ropang." Jurnal Ekonomi & Bisnis 8(3):194–203. doi: 10.58406/jeb.v8i3.570.
- Surya, Andraz, Zain Sugiharto, Asdaf Kabupaten, Temanggung Jawa, Tengah Program, Studi Studi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pembimbing Skripsi, and Joko Moersito. 2024. "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah." (147):1–10.
- Sutrisno. (2007). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.